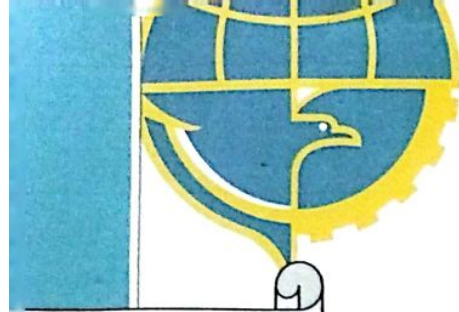




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2023

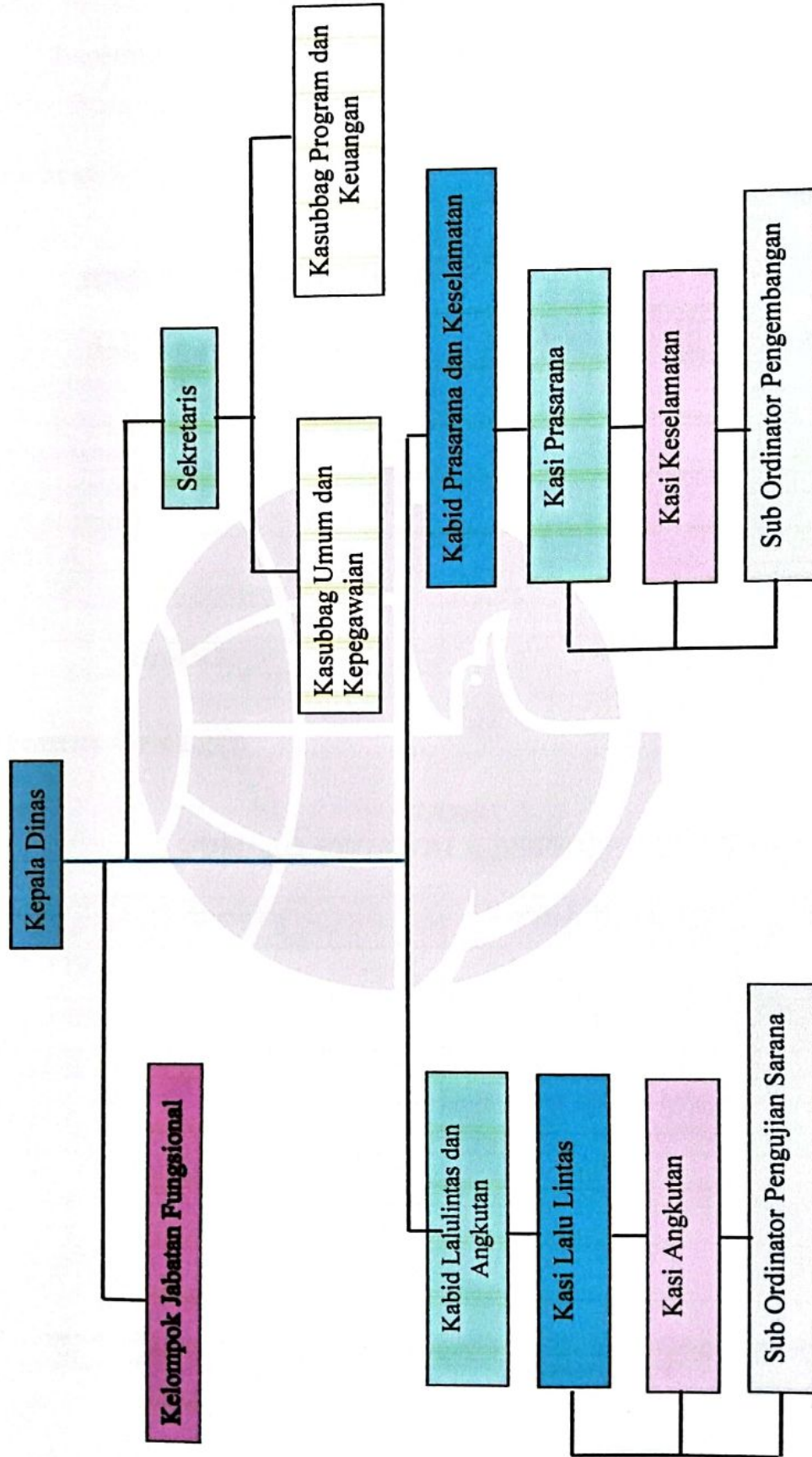
BAB I
PENDAHULUAN**A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam rangka melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja dimaksud Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya

Gambar 2.1 STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan khususnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang perhubungan dalam kurun lima tahun ke depan.

RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2019-2023 Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya RPJMD yang membuat Rencana dan Program Kerja tersebut dilaksanakan dengan tahapan yang dirangkum dalam Rencana Kerja Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja).

RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara telah memasuki tahun keempat pelaksanaan RPJMD. RENSTRA Dinas Perhubungan telah mengalami perubahan pada tahun 2021. Adapun yang menjadi dasar perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara. (Penyusunan Perubahan RPJMD ini Salah satunya didasari oleh terjadi bencana nasional non alam (Pandemi Covid-19) yang sedang mewabah diseluruh Negara di Dunia dan khususnya di seluruh wilayah Indonesia).

Dalam mewujudkan target dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023, perlu adanya tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Padang

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE		
				2021	2022	2023
1	Peningkatan Pelayanan Transportasi yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Peningkatan kualitas angkutan	40%	45%	50%
			Peningkatan Jumlah fasilitas perlengkapan dan keselamatan lalu lintas	8 %	50%	42 %
			Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana Perhubungan	20%	40 %	40 %

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran.

Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. *Rencana kinerja Tahunan yang dilaksanakan pada Rencana kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja terlampir dalam Lampiran II Formulir RKT.*

TABEL 2.2
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN			KEGIATAN				KE T
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Peningkatan kualitas angkutan	45%	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/ atau barang		1 Kegiatan
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
							2 Laporan

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perhubungan TA. 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisat Realisasi Kinerja SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2022. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan

perbaikan yang diperlukan di masa mendatang yang bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi: Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\% \text{ Realisasi capaian Kinerja}}{\% \text{ Target Capaian Kinerja}} \times 100 \%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal seperti pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	>91	Sangat Tinggi	
2	76 > 90	Tinggi	
3	66 > 75	Sedang	
4	51 > 65	Rendah	
5	< 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

A.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran target Indikator kinerja Utama tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 dapat dilihat pada table 3.2 dibawah ini :

1. Simpulan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya bidang perhubungan, dan juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan pada perencanaan berikutnya.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa ketiga indikator kinerja utama mencapai target rata-rata sebesar 68,10% atau dengan Kategori **Sedang**, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Indikator **Peningkatan Kualitas Angkutan** mencapai target sebesar 31,64% dari target yang ditentukan sebesar 45% atau mencapai 70,31% (Kategori **Sedang**).
2. Indikator **Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas** juga mencapai realisasi 42% dari target 50% atau mencapai 84 % (**tinggi**) dari target yang telah ditetapkan
3. indikator **Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana perhubungan** mencapai realisasi 40% dari target 20 % atau mencapai 50 % (**Rendah**) dari target yang telah ditetapkan (realisasi 1 Jenis dari 2 jenis jumlah sarana dan prasarana yang ditargetkan) .

Rata-rata capaian Indikator kinerja Utama untuk semua sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2022 sebesar 68,10%, mengalami peningkatan sebesar 8,10% dari tahun lalu (2021 dimana rata rata capaian kinerja hanya 60%).

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas, baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran pihak penyedia jasa angkutan tentang kendaraan yang laik jalan
- b. Dukungan yang belum sepenuhnya dari para Pengusaha Angkutan
- c. Minimnya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalulintas

mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu Bersama Membangun Masyarakat Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat.

Gunungtua, 28 Maret 2023

Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



M.KADDAFI NASUTION, S.STP, MM

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19840824 200312 1 001



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Peningkatan kualitas angkutan	45%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/ atau barang	1 Kegiatan
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Pelayanan angkutan lebaran natal dan tahun baru	2 Kali
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang	1 Kegiatan
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaksanaan peningkatan disiplin masyarakat pengguna angkutan	2 Kali
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan

			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	1 Laporan	
Peningkatan Jumlah Fasilitas Perencanaan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	50%	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jenis Perencanaan Jalan yang diadakan	1 Kegiatan	
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Papan Informasi yang dibangun	60 Unit	
			Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerucut Lalulintas yang diadakan	100 Unit	
				Jumlah road barrier yang diadakan	40 Unit	
Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	40%	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pembangunan Fasilitas Parkir di Kab. Padang Lawas Utara	1 Kegiatan	
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/ Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas perparkitan yang dibangun	1 Unit	

GUNUNG TUA, 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KAB. PADANG LAWAS UTARA

